

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi penduduk yang cukup besar di dunia (Rahmawati et al., 2024). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia tahun 2024, total populasi Indonesia mencapai 281,6 juta jiwa, sehingga menempatkannya sebagai negara keempat dengan jumlah penduduk terbanyak di Asia (Mukaromah et al., 2025). Besarnya jumlah penduduk di Indonesia seharusnya dapat menjadi kekuatan utama dalam mendorong kemajuan ekonomi nasional. Namun, realitanya kondisi tersebut justru menghadirkan tantangan tersendiri bagi perekonomian, terutama dalam hal penciptaan dan pemerataan lapangan kerja (S. I. Salsabila et al., 2024). Penciptaan lapangan kerja yang tidak sepadan dengan jumlah tenaga kerja yang tersedia akan menimbulkan berbagai permasalahan yang saling berkaitan. Fenomena ini mencerminkan situasi dari pengangguran.

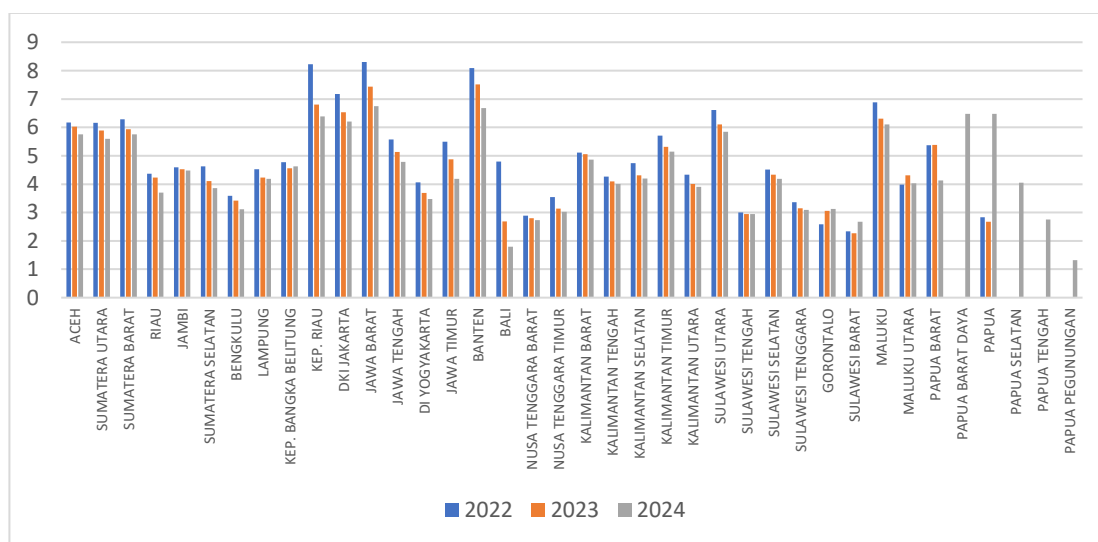
Menurut John Maynard Keynes melalui teori *Keynesian*, pengangguran terjadi ketika permintaan agregat terhadap barang dan jasa tidak mencukupi. Akibatnya, perusahaan tidak perlu menambah tenaga kerja, sehingga ketersediaan lapangan kerja menjadi terbatas. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara jumlah tenaga kerja yang siap bekerja dengan lapangan pekerjaan yang tersedia, yang pada akhirnya berdampak pada tingginya tingkat pengangguran serta memicu berbagai persoalan sosial, seperti meningkatnya kemiskinan, maraknya tindak kriminalitas, serta menurunnya kesejahteraan dan kesehatan mental masyarakat (Suharnanik, 2023). Sejalan dengan pandangan Keynesian, permasalahan

pengangguran juga dapat dijelaskan melalui perspektif teori Lewis yang menekankan pentingnya pemanfaatan kelebihan tenaga kerja. Menurut Lewis, surplus tenaga kerja dapat dimanfaatkan melalui perpindahan ke sektor yang lebih produktif. Peningkatan aktivitas ekonomi tersebut pada akhirnya dapat memperluas kesempatan kerja dan menurunkan tingkat pengangguran.

Pengangguran menjadi parameter untuk menilai sejauh mana angkatan kerja dapat terserap oleh lapangan pekerjaan yang tersedia pada suatu periode. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pengangguran adalah tingkat pengangguran terbuka, yaitu persentase jumlah penganggur dari total angkatan kerja yang aktif mencari pekerjaan namun belum memperoleh pekerjaan (Irnando et al., 2025). Indikator ini mencerminkan kemampuan pertumbuhan ekonomi dalam mendorong peningkatan output dan aktivitas produksi yang secara langsung meningkatkan permintaan tenaga kerja oleh sektor-sektor ekonomi, sehingga memperluas kesempatan kerja dan menurunkan tingkat pengangguran.

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (2023), kondisi ketenagakerjaan Indonesia pada tahun 2024 meningkat dari 4,82 persen pada Februari 2024 menjadi 4,91 persen pada Agustus 2024. Peningkatan ini mencerminkan bahwa sebagian angkatan kerja masih menghadapi kendala dalam memperoleh pekerjaan, meskipun perekonomian nasional telah menunjukkan pemulihan pascapandemi. Dengan demikian, tingkat pengangguran masih menjadi isu strategis sekaligus menjadi tantangan dalam mewujudkan tujuan pembangunan ketenagakerjaan, yang berfokus pada optimalisasi potensi tenaga kerja secara produktif, serta pada upaya

pemerataan kesempatan kerja yang selaras dengan kebutuhan pembangunan nasional maupun daerah (D. P. Sari et al., 2023). Sebagai respons, pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas (2019) menetapkan arah pembangunan jangka panjang menuju Visi Indonesia 2045, di mana salah satu pilarnya menekankan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia, dengan menargetkan tingkat pengangguran pada kisaran 3-4 persen, yang dianggap sebagai tingkat pengangguran alami (*natural rate of unemployment*) sehingga mendekati kondisi kesempatan kerja penuh (*full employment*) (Adipratomo et al., 2024). Upaya tersebut juga sejalan dengan agenda pembangunan global yang tertuang dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan ke-8 yang berfokus pada penyediaan pekerjaan layak serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan.



Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia

**Gambar 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi di Indonesia
Tahun 2022-2024 (Persen)**

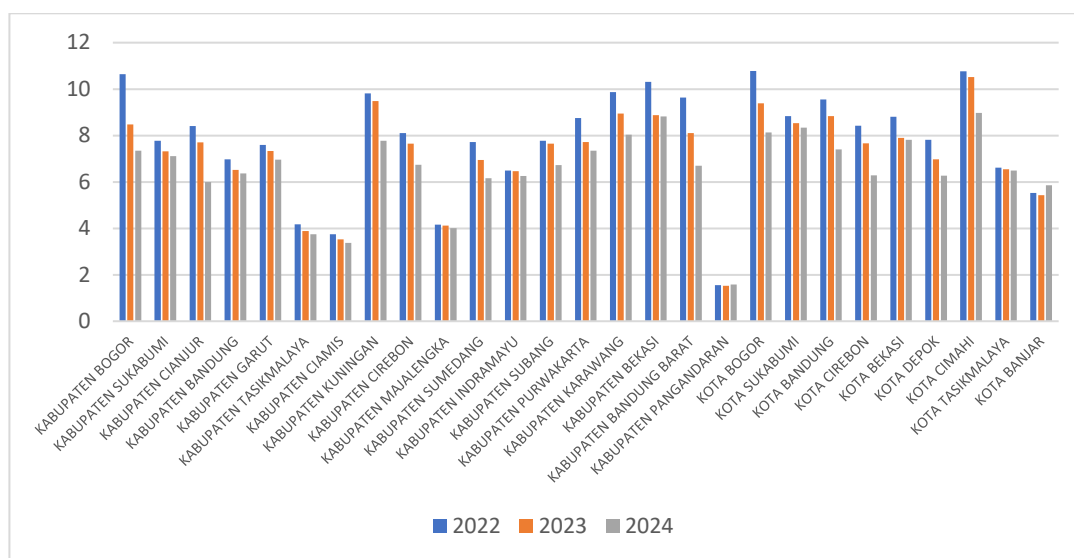
Berdasarkan data pada gambar 1.1, menunjukkan bahwa konsentrasi tingkat pengangguran seluruh Provinsi di Indonesia pada periode 2022-2024 sebagian besar disumbang oleh Provinsi Jawa Barat, yaitu sekitar 8-9 persen. Meskipun menjadi pusat kegiatan ekonomi dengan infrastruktur tenaga kerja yang relatif maju, tekanan pasar kerja di provinsi ini masih cukup tinggi, menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya diikuti peningkatan penyerapan tenaga kerja. Sementara itu, wilayah seperti Papua, Nusa Tenggara, dan Sulawesi menunjukkan tingkat pengangguran yang lebih rendah, dengan sebagian besar provinsi lainnya berada pada kisaran menengah 3-6 persen. Berdasarkan Sakernas Agustus 2024, Jawa Barat mencatat TPT tertinggi secara nasional sebesar 6,75 persen (BPS, 2024).

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, namun masih menghadapi permasalahan ketenagakerjaan yang tercermin dari tingginya tingkat pengangguran (Septiyanto & Tusianti, 2020). Tahun 2024 dipilih sebagai fokus penelitian karena merepresentasikan fase pasca pemulihan ekonomi nasional setelah tekanan utama pandemi Covid-19 dan meredanya kebijakan stimulus melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat, perekonomian mengalami kontraksi sebesar -2,52 persen pada tahun 2020, kemudian pulih menjadi 3,74 persen pada 2021 dan meningkat menjadi 5,45 persen pada 2022, yang menunjukkan fase *recovery* pasca pandemi. Setelah itu, pertumbuhan mulai melambat menjadi 5,00 persen pada 2023 dan kembali turun menjadi 4,95 persen pada 2024, sebelum meningkat lagi menjadi 5,32 persen pada

2025 (Bagaskara, 2025). Meskipun perlambatan mulai terlihat pada 2023, kondisi tersebut masih dapat dipandang sebagai penyesuaian pasca lonjakan pertumbuhan tahun 2022, sedangkan tahun 2024 menunjukkan keberlanjutan perlambatan yang mulai berdampak nyata terhadap ketenagakerjaan. Hal ini terlihat dari tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang turun dari 6,91 persen pada Februari menjadi 6,75 persen pada Agustus, namun penurunannya hanya sebesar 0,16 persen, lebih kecil dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 0,45 persen (BPS, 2024). Selain itu, jumlah penduduk Jawa Barat yang mencapai 51.316.378 jiwa atau sekitar 18,1% dari total penduduk Indonesia turut meningkatkan tekanan terhadap daya beli masyarakat, sehingga memperlambat aktivitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Sejak pertengahan 2024, masyarakat lebih selektif dalam konsumsi dengan memprioritaskan kebutuhan pokok, yang menyebabkan melemahnya permintaan barang non-primer dan menekan sektor industri pengolahan hingga berujung pada pengurangan jam kerja serta Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) (Sutrisno, 2025).

Secara administratif, menurut Publikasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2023, wilayah Provinsi Jawa Barat mencakup 27 kabupaten/kota yang terdiri dari 18 kabupaten dan 9 kota. Pembagian wilayah yang luas dan beragam ini turut memengaruhi pola penyerapan tenaga kerja, karena tiap kabupaten/kota memiliki karakteristik ekonomi dan ketersediaan lapangan kerja yang berbeda, sehingga berdampak pada variasi tingkat pengangguran di seluruh provinsi. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa meskipun terdapat peluang kerja di beberapa wilayah, tingkat pengangguran terbuka tetap menjadi indikator penting yang mencerminkan tantangan struktural dalam penyerapan tenaga kerja di

Jawa Barat. Untuk menelaah lebih lanjut perbedaan kondisi pasar kerja di dalam wilayah tersebut, berikut disajikan tingkat pengangguran terbuka (TPT) per kabupaten/kota di Jawa Barat periode 2022-2024.



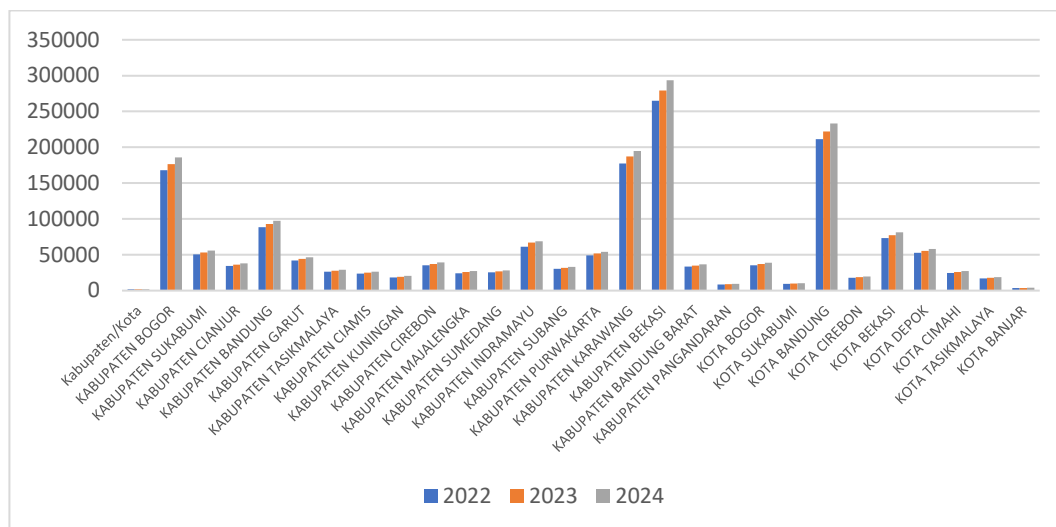
Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia

Gambar 1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024 (Persen)

Sebaran tingkat pengangguran di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat pada periode 2022-2024 menunjukkan pola spasial yang tidak merata, di mana wilayah dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) tinggi umumnya terkonsentrasi di kawasan perkotaan dan industri, yaitu Kota Cimahi, Kota Bogor, dan Kabupaten Bekasi. Berdasarkan data, daerah dengan TPT tertinggi terdapat di Kota Cimahi dengan rata-rata berada pada kisaran 9-11 persen, diikuti oleh Kota Bogor, serta Kabupaten Bekasi. Daerah-daerah tersebut sebagian besar berada di wilayah barat dan tengah Jawa Barat, yaitu kawasan dengan aktivitas industri dan urbanisasi yang tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa wilayah dengan kepadatan penduduk besar dan dominasi sektor sekunder maupun tersier menghadapi tekanan pasar tenaga

kerja yang lebih besar, ditandai oleh tingginya jumlah pencari kerja yang belum terserap secara optimal. Sementara itu, daerah dengan tingkat pengangguran relatif rendah umumnya berada di bagian selatan dan timur Jawa Barat, seperti Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Majalengka, yang menunjukkan proporsi pengangguran di bawah lima persen. Wilayah-wilayah tersebut didominasi oleh sektor pertanian dan ekonomi berbasis lokal yang bersifat informal, sehingga meskipun produktivitasnya lebih rendah, penyerapan tenaga kerja relatif lebih tinggi.

Tingginya tingkat pengangguran tersebut tidak hanya disebabkan oleh ketersediaan lapangan kerja, tetapi juga berkaitan dengan dinamika pertumbuhan ekonomi daerah yang mencerminkan kemampuan suatu wilayah dalam memperluas aktivitas produksi dan menciptakan kesempatan kerja baru. Pertumbuhan ekonomi sendiri menunjukkan peningkatan aktivitas perekonomian yang menghasilkan bertambahnya produksi barang dan jasa di suatu wilayah (Anggoro & Soesatyo, 2015). Kenaikan output tersebut berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat, yang umumnya tercermin melalui nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Muminin & Hidayat R, 2017). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi kerap dijadikan indikator keberhasilan pembangunan (Nuraini & Hariyani, 2019). Namun, pertumbuhan ekonomi tidak selalu berjalan stabil di setiap wilayah. Ketika pertumbuhan ekonomi suatu daerah mengalami perlambatan atau tidak berkembang secara optimal, kemampuan wilayah tersebut untuk menciptakan lapangan kerja baru juga menjadi terbatas, sehingga tingkat pengangguran berpotensi tetap tinggi.

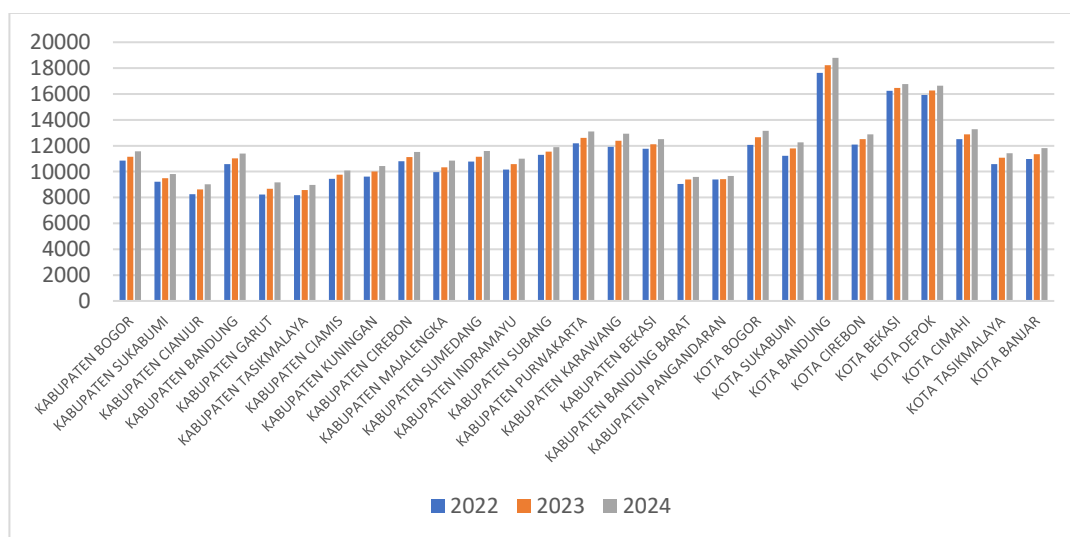


Sumber : Portal Ekosistem Data Jabar

Gambar 1.3 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024 (Miliar Rupiah)

Grafik tingkat PDRB menurut kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2022-2024 tersebut menggambarkan adanya tren pertumbuhan ekonomi yang positif di Jawa Barat, namun dengan ketimpangan antarwilayah yang masih cukup jelas. Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bogor, Kota Bandung, dan Kota Bekasi sebagai daerah dengan PDRB tinggi umumnya memiliki aktivitas ekonomi dan sektor industri yang lebih berkembang sehingga kapasitas penyerapan tenaga kerjanya lebih besar. Sebaliknya, kabupaten/kota dengan PDRB lebih rendah memiliki keterbatasan aktivitas produksi dan kesempatan kerja sehingga berpotensi memiliki tingkat pengangguran terbuka yang lebih tinggi atau penurunannya lebih lambat. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Suhadi & Setyowati (2022), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbukti memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada 26 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama periode 2018-2020.

Tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat tidak semata-mata ditentukan oleh ketersediaan lapangan kerja, melainkan juga dipengaruhi oleh tingkat pengeluaran masyarakat yang berdampak pada permintaan barang dan jasa dalam perekonomian. Keberhasilan pembangunan ekonomi tercermin melalui peningkatan kapasitas konsumsi masyarakat yang muncul seiring dengan naiknya tingkat pendapatan (Danawati et al., 2016). Menurut Miler (dalam Manuati Dewi, 2015; dikutip dalam Martaningsih D & Marhaeni, 2021), konsumsi dapat diartikan sebagai total barang dan jasa yang dibutuhkan dan dibeli oleh masyarakat dalam suatu perekonomian untuk memenuhi kebutuhan pada periode sekarang. Tingkat pengeluaran yang rendah dapat membatasi daya beli masyarakat, sehingga permintaan terhadap produk dan jasa menurun, yang selanjutnya menekan produksi dan investasi di berbagai sektor.



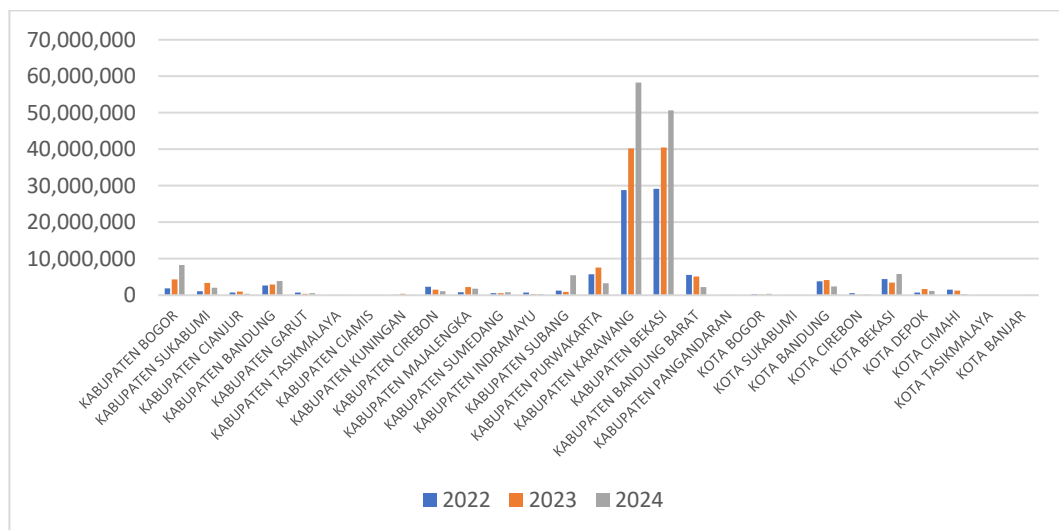
Sumber : Portal Ekosistem Data Jabar

Gambar 1.4 Tingkat Konsumsi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024 (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)

Grafik tersebut menunjukkan pola peningkatan konsumsi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat selama periode 2022-2024, di mana setiap daerah mengalami kenaikan tingkat pengeluaran dari tahun ke tahun. Hampir semua daerah, baik kabupaten maupun kota, mengalami kenaikan nilai pengeluaran setiap tahunnya, yang mencerminkan adanya perbaikan daya beli masyarakat, pertumbuhan aktivitas ekonomi, serta peningkatan kebutuhan konsumsi rumah tangga. Daerah perkotaan seperti Kota Bandung, Kota Bekasi, dan Kota Depok memiliki tingkat pengeluaran yang lebih tinggi dibandingkan kabupaten lain, menunjukkan karakteristik ekonomi perkotaan yang lebih padat dan dinamis. Sementara itu, kabupaten seperti Garut, Tasikmalaya, dan Cianjur berada pada tingkat pengeluaran yang relatif lebih rendah namun tetap mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Secara umum, pola kenaikan yang merata di seluruh wilayah mengindikasikan pertumbuhan ekonomi regional yang positif di Jawa Barat selama periode tersebut. Temuan ini sejalan dengan penelitian W. Sari et al. (2025), variabel konsumsi terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di provinsi Lampung pada tahun 2014-2024.

Dalam pembangunan ekonomi, investasi berperan penting dalam meningkatkan kapasitas produksi serta memperluas kesempatan kerja (Harahap et al., 2023), di mana peningkatannya umumnya diikuti oleh penurunan tingkat pengangguran seiring berkembangnya aktivitas ekonomi (Tarigan et al., 2025). Peningkatan konsumsi mencerminkan kuatnya daya beli dan potensi pasar yang menciptakan iklim investasi menarik bagi investor, termasuk investor asing, sehingga mendorong masuknya Penanaman Modal Asing (PMA). Menurut Susila

et al. (2020), Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan penerimaan investasi luar negeri tertinggi di Indonesia, namun konsentrasi PMA yang terpusat pada kawasan industri dan pusat pertumbuhan menimbulkan ketimpangan spasial. Akumulasi PMA di wilayah tertentu mempercepat peningkatan kapasitas produksi, nilai tambah, dan pertumbuhan ekonomi. Sementara daerah dengan PMA yang lebih rendah berkembang relatif tertinggal. Fluktuasi nilai Penanaman Modal Asing (PMA) pada 27 kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat selama periode 2022-2024 selanjutnya disajikan sebagai berikut.



Sumber : Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

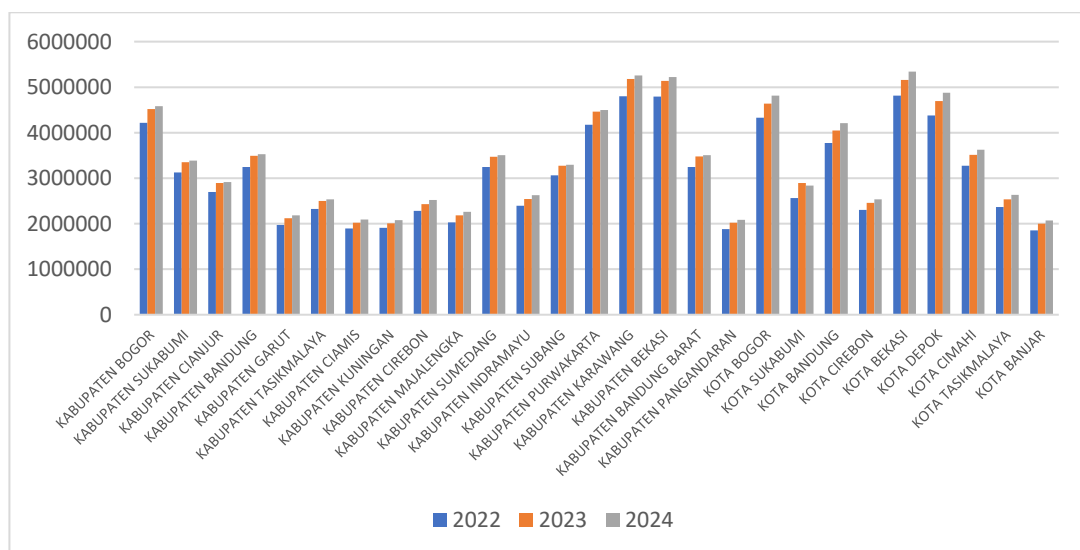
Gambar 1.5 Penanaman Modal Asing Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024 (Juta Rupiah)

Berdasarkan grafik tersebut, konsentrasi Penanaman Modal Asing (PMA) di wilayah metropolitan dan daerah penyangga berimplikasi langsung terhadap perbedaan laju pertumbuhan ekonomi antardaerah di Jawa Barat. Aliran PMA yang besar ke wilayah seperti Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang mendorong peningkatan kapasitas produksi dan output regional, sehingga pertumbuhan PDRB

di daerah tersebut relatif lebih tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Ekspansi aktivitas industri yang terjadi juga memperluas kesempatan kerja melalui peningkatan permintaan tenaga kerja, yang berkontribusi terhadap penurunan tingkat pengangguran. Sebaliknya, kabupaten/kota di luar kawasan metropolitan dengan aliran PMA yang lebih terbatas cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat, sehingga penciptaan lapangan kerja menjadi tidak optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsentrasi PMA tidak hanya memengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperlebar disparitas tingkat pengangguran antarwilayah di Provinsi Jawa Barat. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh S. D. Salsabila (2025), hasil penelitian menunjukkan bahwa PMA berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi pada 38 kabupaten/kota di Jawa Timur pada periode 2019-2023.

Faktor lain yang memengaruhi tinggi rendahnya tingkat pengangguran adalah besaran upah yang diterima tenaga kerja (Lestari & Nilasari, 2025). Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, setiap individu dituntut untuk bekerja, di mana imbalan atas kontribusi tenaga dan waktu yang diberikan diwujudkan dalam bentuk upah (Permadi & Chrystanto, 2021). Selain itu, upah yang memadai mendorong pekerja untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitasnya, sehingga secara tidak langsung mendukung efisiensi dan daya saing perusahaan. Besaran upah yang adil tidak hanya menjadi insentif bagi pekerja, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme untuk menarik dan mempertahankan tenaga kerja berkualitas. Pemberian upah yang memadai sejalan dengan teori upah efisiensi yang

dikemukakan oleh *Gregory Mankiw*, yang menekankan hubungan antara tingkat upah dan produktivitas pekerja. Menurut teori ini, upah yang cukup berperan penting dalam mempertahankan kinerja tenaga kerja, karena penurunan upah berpotensi menurunkan motivasi, efektivitas kerja, serta keuntungan perusahaan (Solicha et al., 2024). Sebaliknya, apabila peningkatan upah minimum berlangsung bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan peningkatan produktivitas, potensi dampak negatif terhadap tingkat pengangguran dapat ditekan (Nurfardhan et al., 2025). Hal ini tercermin pada besaran Upah Minimum Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat pada tahun 2024, yang menunjukkan variasi tingkat upah sesuai dengan kondisi ekonomi dan produktivitas masing-masing wilayah.



Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia

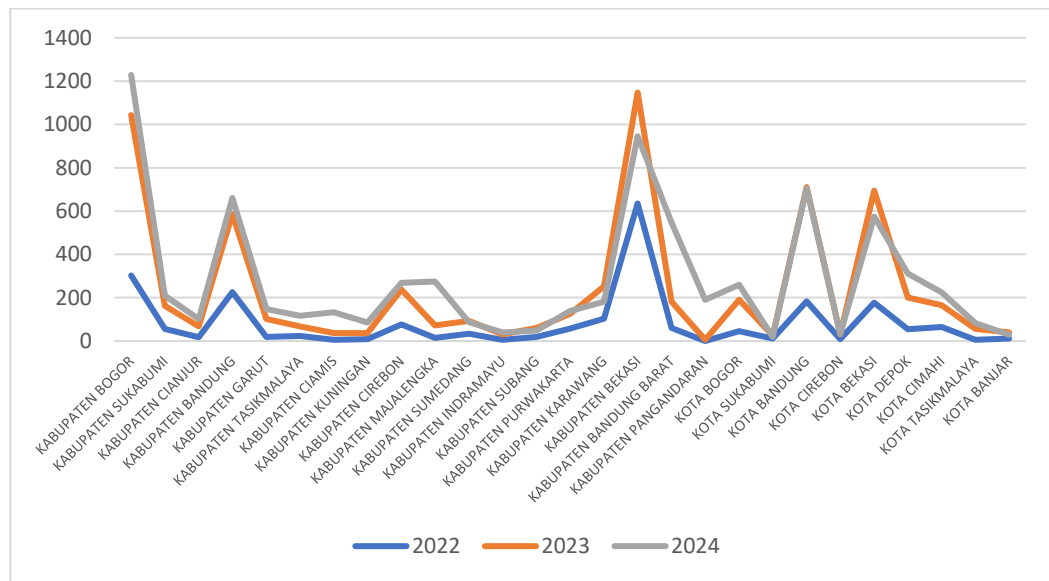
Gambar 1.6 Upah Minimum Kabupaten/Kota Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024 (Rupiah)

Perkembangan upah minimum kabupaten/kota (UMK) di Provinsi Jawa Barat selama periode 2022–2024 menunjukkan kenaikan yang berkelanjutan di

hampir seluruh wilayah. Kota-kota dengan aktivitas industri dan perdagangan yang tinggi, seperti Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Depok, serta Kabupaten Karawang, mencatat UMK yang jauh lebih besar dibandingkan daerah agraris seperti Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, dan Kota Banjar. Perbedaan ini merefleksikan variasi tingkat produktivitas dan biaya hidup antar daerah, sekaligus menunjukkan penyesuaian upah oleh pemerintah lokal untuk menjaga daya beli pekerja. Peningkatan UMK dapat memperkuat daya beli tenaga kerja dan mendorong kapasitas produksi melalui peningkatan konsumsi, yang selanjutnya membuka peluang penyerapan tenaga kerja dan menekan tingkat pengangguran. Hal ini sejalan dengan penelitian Lokiman et al. (2014), temuan penelitian mengindikasikan bahwa peningkatan Upah Minimum Provinsi (UMP) memberikan dampak positif dan signifikan secara langsung terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) di Kota Manado pada periode 2003-2012.

Sejalan dengan peningkatan upah yang mendorong kapasitas produksi, ketersediaan tenaga kerja yang produktif menjadi faktor penting dalam penciptaan lapangan kerja, terutama di sektor industri yang mampu menyerap tenaga kerja secara luas (Shaffa & Abdullah, 2023). Tenaga kerja yang produktif tidak hanya ditentukan oleh jumlah angkatan kerja, tetapi juga oleh kualitas pendidikan, keterampilan, kesehatan, serta kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan industri. Menurut pandangan teori klasik, manusia merupakan faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran suatu bangsa, karena sumber daya alam, seperti tanah, akan kurang bernilai tanpa kemampuan manusia untuk mengolahnya sehingga bermanfaat bagi kehidupan (Fahlevi &

Dewi, 2016). Penyerapan tenaga kerja di sektor industri juga semakin didorong oleh ketentuan perizinan usaha, yang mewajibkan pelaku usaha mencantumkan komitmen penyerapan tenaga kerja, di mana sekitar 70% di antaranya harus berasal dari penduduk lokal (Pandiangan et al., 2021). Ketentuan ini memperkuat peran sektor industri sebagai motor penyedia lapangan kerja. Selain memberikan kesempatan kerja langsung, keberadaan industri juga menciptakan efek tidak langsung berupa munculnya kegiatan ekonomi turunan seperti usaha perdagangan, transportasi, dan jasa penunjang lainnya di sekitar kawasan industri. Sektor industri sendiri memegang peranan strategis dalam perekonomian Indonesia, karena mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap devisa negara, meningkatkan pendapatan per kapita, serta membuka berbagai peluang kerja yang pada akhirnya membantu menurunkan tingkat pengangguran (Agatha & Yasin, 2024). Khususnya di Jawa Barat, yang memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja bagi tenaga kerjanya, yang didorong oleh keberadaan kawasan industri yang luas sehingga provinsi ini sering dijuluki sebagai jantung industri Indonesia (Aziziah & Ekawaty, 2023). Selain itu, perkembangan sektor industri juga mendorong pertumbuhan sektor lain, seperti pertanian dan jasa, yang pada gilirannya memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan pendapatan, permintaan, dan daya beli masyarakat (Nante et al., 2024). Sebagai bagian penting dari sektor industri, Industri Kecil dan Menengah memiliki peranan signifikan dalam menyerap tenaga kerja dan mendukung perekonomian lokal (Fahlevi & Dewi, 2016).



Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia

Gambar 1.7 Jumlah Industri Kecil Menengah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024 (Unit)

Perkembangan industri kecil dan menengah (IKM) di Jawa Barat selama 2022-2024 menunjukkan dinamika yang cukup beragam antar wilayah. Kabupaten Bogor mencatat pertumbuhan IKM paling pesat, sedangkan beberapa kabupaten agraris seperti Majalengka, Ciamis, dan Pangandaran mencatat lonjakan signifikan dari jumlah awal yang relatif rendah, menandakan munculnya peluang usaha baru di daerah tersebut. Kota-kota besar seperti Bandung dan Depok tetap mempertahankan pertumbuhan IKM yang stabil, sementara kota kecil mengalami fluktuasi yang lebih nyata. Kondisi ini menegaskan bahwa pertumbuhan sektor industri tidak hanya terkonsentrasi di wilayah metropolitan, tetapi mulai merata ke berbagai kabupaten, sehingga berpotensi mendukung penciptaan lapangan kerja dan pengurangan tingkat pengangguran di provinsi ini. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian Meisi et al., (2021), di mana unit usaha berpengaruh linier positif dan signifikan terhadap PDRB industri pengolahan di Provinsi Jambi.

Berdasarkan uraian sebelumnya, berbagai penelitian telah menyoroti faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengangguran, seperti tingkat konsumsi, investasi, upah minimum, dan sektor industri. Namun, sebagian besar penelitian masih terbatas pada analisis pengaruh langsung tanpa mempertimbangkan peran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai variabel mediasi yang menyalurkan pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap permintaan agregat dan tingkat pengangguran. Kondisi ini menjadi perhatian penulis, sehingga muncul ketertarikan untuk meneliti fenomena tersebut secara lebih mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul : **Peran PDRB Dalam Memediasi Pengaruh Tingkat Konsumsi, PMA, Upah Minimum, dan Industri Kecil Menengah Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2024**, yang bertujuan untuk mengkaji pengaruh tingkat konsumsi, PMA, UMK, dan industri kecil dan menengah terhadap TPT melalui PDRB, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika ketenagakerjaan di seluruh kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat.

1.2. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pengaruh tingkat konsumsi, PMA, upah minimum kabupaten/kota, dan industri kecil dan menengah terhadap PDRB di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat tahun 2024?
2. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat tahun 2024?
3. Bagaimana PDRB memediasi hubungan antara tingkat konsumsi, PMA, upah minimum kabupaten/kota, dan industri kecil dan menengah terhadap

tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat tahun 2024?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh tingkat konsumsi, PMA, upah minimum kabupaten/kota, dan industri kecil dan menengah terhadap PDRB di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat tahun 2024.
2. Untuk menganalisis pengaruh PDRB terhadap tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat tahun 2024.
3. Untuk menganalisis peran PDRB sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara tingkat konsumsi, PMA, upah minimum kabupaten/kota, dan industri kecil dan menengah terhadap tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat tahun 2024.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan tidak hanya untuk menjawab permasalahan empiris terkait pengangguran di Jawa Barat, tetapi juga untuk memberikan kontribusi nyata baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan. Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut.

1.4.1. Kegunaan Pengembangan Ilmu

Penelitian ini memiliki kebaruan dalam kajian ekonomi ketenagakerjaan dan pembangunan daerah, karena memasukkan PDRB sebagai variabel mediasi dalam menjelaskan tingkat pengangguran terbuka. Pendekatan seperti ini masih jarang digunakan pada penelitian sebelumnya, terutama pada tingkat

kabupaten/kota. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan variabel tingkat konsumsi, PMA, upah minimum kabupaten/kota, dan industri kecil dan menengah dalam satu model struktural untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pengangguran. Hasil pengintegrasian tersebut menunjukkan bahwa PDRB mampu memediasi pengaruh PMA dan industri kecil dan menengah terhadap tingkat pengangguran terbuka, menegaskan peran PDRB sebagai mekanisme transmisi aktivitas investasi dan perkembangan usaha terhadap penyerapan tenaga kerja. Penggabungan variabel-variabel tersebut memberikan sudut pandang yang lebih komprehensif terhadap dinamika pengangguran antarwilayah dan menjadi bentuk inovasi dalam pendekatan analisis pembangunan daerah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur di bidang pembangunan daerah, tetapi juga dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya dalam mengkaji determinan pengangguran menggunakan pendekatan yang serupa.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dalam merumuskan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran. Temuan penelitian ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang paling berpengaruh terhadap pengangguran terbuka, sehingga kebijakan pembangunan dapat difokuskan pada peningkatan daya beli konsumsi, pemerataan investasi, penetapan upah minimum, serta pengembangan industri kecil menengah yang selaras dengan kapasitas perekonomian daerah. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan gambaran bagi pelaku usaha dan

masyarakat dalam memahami dinamika pasar tenaga kerja di Jawa Barat sebagai dasar pengambilan keputusan strategis.

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari 27 kabupaten/kota. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada tingginya dinamika ketenagakerjaan dan variasi kondisi ekonomi antarwilayah. Data yang digunakan bersumber dari BPS Provinsi Jawa Barat, Portal Ekosistem Data Jabar, dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

1.5.2. Jadwal Penelitian

Tabel 1. 1 Jadwal Penelitian

[illegible]